

DKI JAKARTA

Perusahaan Wajib Jujur untuk Putus Penularan

KEPALA Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi (Disnaker) DKI Jakarta Andri Yansyah menyebut saat ini para perusahaan enggan untuk melaporkan kasus covid-19 yang menimpa karyawan.

Menurutnya, diduga hal itu terjadi karena para perusahaan khawatir karena harus menutup kantor selama tiga hari jika ada kasus covid-19 menimpa karyawan.

"Perusahaan itu harus lapor dan jujur. Meskipun memang ada ketentuan bahwa mereka harus tutup, tapi itu kan demi kebaikan dan keselamatan bersama," ujar Andri, di Jakarta, kemarin.

Selain itu, Andri menegaskan perusahaan harus bertindak cepat bila ada karyawan yang memiliki gejala atau terpapar covid-19. Tindakan cepat ini ialah bagian dari tugas perusahaan membentuk Satgas covid-19 di internal mereka sesuai Surat Kepala Disnaker No 1477/2020.

Andri mengungkapkan kewajiban perusahaan untuk melapor agar Dinas Kesehatan DKI Jakarta dapat terjun langsung melakukan penelusuran kontak kepada orang-orang yang berinteraksi dengan karyawan yang terpapar tersebut.

Andri pun mengaku sudah menegur manajemen kanal media daring *Okezone* karena tak memberikan laporan mengenai kasus covid-19 yang ada di perusahaan itu. Andri mengatakan ia mendapat informasi adanya karyawan *Okezone* yang terpapar covid-19 dari masyarakat.

Ia mengakui inspeksi mendadak (sidak) yang selama ini dilakukannya kurang efektif. Pasalnya, jumlah perusahaan yang harus diawasi terlalu ba-

nyak, yakni mencapai 78 ribu perusahaan. Sementara itu, tenaga pengawas di Disnaker hanya 58 orang.

Disnaker, lanjutnya, membutuhkan peran aktif masyarakat apakah itu internal maupun di eksternal perusahaan untuk melapor.

Sejauh ini sudah tiga perusahaan di Jakarta yang melapor karyawan mereka terpapar covid-19.

Juru Bicara Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito meminta Satgas di daerah bersama pengelola gedung perkantoran melakukan evaluasi mendalam. "Apabila terjadi pertumbuhan kasus di perkantoran, berarti ada hal yang tidak sempurna dalam pelaksanaannya," ujar Wiku.

Ketua Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Doni Monardo pun telah memberikan arahan kepada pelaku usaha untuk menerapkan kegiatan bisnis secara terpisah menjadi dua sif. Langkah tersebut perlu dilakukan demi mencegah terjadinya kerumunan di perkantoran sehingga menimbulkan potensi penularan covid-19 yang lebih besar.

"Untuk karyawan yang rentan, kita minta tidak diberi kewajiban ke kantor. Lansia, penderita hepatitis, jantung, ginjal, dan penyakit pernapasan kalau bisa bekerja dari rumah," tuturnya.

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Zita Anjani meminta warga tidak perlu khawatir soal perkantoran menjadi klaster baru. Menurutnya, selama pemeriksaan tes covid-19 masif, deteksi penularan virus tersebut bisa dijangkau. (Put/Pra/Ssr/Ins/J-1)



ANTARA/FAKHRI HERMAANSYAH

PENAMBAHAN FREKUENSI PERJALANAN KRL: Penumpukan para penumpang menunggu kedatangan KRL dengan mengabaikan jaga jarak di Stasiun Tambun, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, kemarin. PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) akan menambah frekuensi perjalanan KRL setiap harinya menjadi 966, dengan penambahan lintas Bogor-Angke dan Manggarai-Tambun agar penumpang dapat menjaga jarak untuk mencegah penularan covid-19.

BOGOR

Menteri ATR Kenalkan HITS Selesaikan Jabodetabekjur

KEMENTERIAN Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN) terus bergerak menyosialisasikan Peraturan Presiden No 60/2020.

Setelah sebelumnya *roadshow* ke Pemprov DKI Jakarta dan Banten, Kementerian ATR/BPN sosialisasi ke Provinsi Jawa Barat.

Sosialisasi Perpres No 60/2020 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, dan Cianjur (Jabodetabekjur), digelar di Pullman Ciawi Hotel Resort, Spa and Convention, Jalan Raya Puncak, Kabupaten Bogor, Senin (27/7).

Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan Djalil mengumpulkan para kepala daerah. Hadir Gubernur Jabar Ridwan Kamil dan seluruh kepala daerah terkait, yakni Bupati Bogor, Wali Kota Bogor, Wakil Wali Kota Bekasi, perwakilan Bupati Bekasi, perwakilan Wali Kota Depok, perwakilan Tangerang, dan perwakilan Cianjur.

Selain menyosialisasikan Perpres No 60/2020, pertemuan itu juga membahas rencana pembentukan Kelembagaan Koordinasi Pengelolaan Kawasan Jabodetabekpunjur. Selibuhnya membicarakan permasalahan lintas wilayah yang perlu segera diselesaikan.

Dalam menyelesaikan kompleksitas per-

masalah kawasan, Sofyan Djalil memperkenalkan konsep HITS (holistik, integratif, tematik, dan spasial) yang menyentuh seluruh aspek permasalahan dengan melibatkan pemangku kepentingan terkait.

"Permasalahan di Kawasan Jabodetabekpunjur membutuhkan kerja sama yang bersifat interregional dan melibatkan seluruh pemangku kepentingan terkait. Baik di pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Pendekatan HITS akan diterapkan dalam melihat akar permasalahan dan menciptakan solusi," ungkapnya.

Salah satu materi kawasan yang dibahas, yaitu penanganan banjir disebabkan berkurangnya daerah resapan air di wilayah Puncak. Hal tersebut, di antaranya diakibatkan perubahan pemanfaatan ruang yang sebelumnya kawasan lindung (hutan) menjadi kawasan budi daya (seperti permukiman), ditambah dengan banyaknya bangunan yang tidak memiliki izin (ilegal).

Presiden Joko Widodo menerbitkan Perpres No 60/2020 untuk menyelesaikan persoalan di kawasan Jabodetabekpunjur. Saat ini kawasan Jabodetabekpunjur memiliki berbagai permasalahan, khususnya banjir dan longsor, sampah, sanitasi, ketersediaan air bersih, kawasan kumuh dan bangunan ilegal, serta kemacetan lalu lintas. (DD/J-2)

LINTAS BERITA

Realisasi Program Banjir DKI Jakarta Minim

WAKIL Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria membenarkan realisasi program pengendalian banjir di Ibu Kota yang dikerjakan selama setahun terakhir masih di bawah 70%.

Riza mengemukakan itu dalam pandangan fraksi terhadap Raperda Provinsi DKI Jakarta tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019, di Gedung DPRD DKI Jakarta, kemarin. "Mengenal program pengendalian banjir dan abrasi yang hanya terealisasi sebesar 63,76%. Saya sampaikan, hal tersebut disebabkan kendala teknis di lapangan," kata Riza.

Pemprov DKI Jakarta tetap melaksanakan langkah antisipasi dan dalam menghadapi musim hujan melalui pemeliharaan sarana dan prasarana pengendalian banjir secara rutin, serta mempercepat pembangunan beberapa waduk dalam kota. (Ins/J-3)

Idris dan Pradi Bersaing di Pilkada Depok

WALI Kota Depok Idris Abdul Shomad dan wakilnya, Pradi Supriatna, akan saling berhadapan dalam Pilkada Depok 2020. Pertarungan diprediksi berlangsung ketat karena keduanya memiliki basis massa yang kuat.

Idris maju sebagai calon wali kota dengan dukungan empat parpol, yaitu Partai Keadilan Sejahtera, Partai Demokrat, Partai Persatuan Pembangunan, dan Partai Amanat Nasional. Sementara itu, Pradi mendapat restu dari lima parpol pengusung, yakni Partai Gerindra, PDIP, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Golkar, dan Partai Solidaritas Indonesia.

Ketua Komisi A DPRD Kota Depok Hamzah, kemarin, meyakini persaingan kedua petahana akan sangat ketat. Maklum, di parlemen Kota Depok, lima parpol pendukung Pradi memiliki 29 kursi, sedangkan empat parpol pendukung Idris memiliki 21 kursi. (KG/J-3)

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk
KANTOR PUSAT
Jalan Jenderal Sudirman No. 44 - 46 Trolom Pos 1094/1000 Jakarta 10210
Telepon: 2510244, 2510254, 2510269, 2510264, 2510279
Facsimile: 2500077, Kawal: KANPUSBR1
Website: www.br.co.id

PENGUMUMAN PELELANGAN
Nomor: B.3076.e-PB/J/PBN/07/2020 Tanggal 24 Juli 2020

Dalam rangka Pengadaan Bahan Seragam Korporat Frontliner Tahun 2020 PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk mengundang Penyedia Barang dan/atau Jasa untuk mengikuti Pelelangan dengan ketentuan sebagai berikut :

- Pendaftaran Peserta Lelang**
Hari/Tanggal : 24 s.d 28 Juli 2020
Waktu : 10.00 WIB s.d 15.00 WIB
Tempat : Sentra Layanan Divisi Pengadaan Barang dan Jasa Kantor Pusat PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Gedung BRI 2 Lantai 25 Jln. Jend. Sudirman Kav 44-46 Jakarta Telp/Fax: (021) 57905540/ 57905736
- Lingkup Pekerjaan**
Pengadaan Bahan Seragam Korporat Frontliner Tahun 2020.
- Syarat-syarat Pendaftaran**
3.1. Calon peserta menyampaikan Surat Pernyataan Minat Mengikuti Lelang Asli Bermaterai.
3.2. Calon peserta merupakan perusahaan yang berbentuk badan usaha yang telah mendapat pengesahan dari lembaga pejabat yang berwenang.
3.3. Calon peserta harus mempunyai kelengkapan administrasi berupa:

No.	Kriteria Calon Peserta	Keterangan
1.	Tanda Daftar Rekanan (TDR)	Memiliki Tanda Daftar Rekanan (TDR) atau SKT sementara yang diterbitkan oleh BRI atau tanda terima penyerahan dokumen permohonan menjadi rekanan BRI.
2.	Bentuk Perusahaan	Perusahaan berbentuk PT, yang berbadan hukum
3.	Bidang Usaha	Tekstil atau Garmen
4.	Pengalaman Usaha	Minimal 3 Tahun
5.	Ijin usaha dan Sertifikasi	Sertifikat atau Surat Ijin Usaha dari instansi yang berwenang dengan kualifikasi "B" atau Non Kecil
6.	Mesin Tekstil	Menyampaikan daftar mesin tekstil yang dimiliki oleh perusahaan dan/atau grup perusahaan (diukutkan dengan AD/ART) serta kapasitas produksi setiap bulan. Catatan: Apabila diperlukan, Panitia Pengadaan Barang dan Jasa akan melakukan pengecekan ketersediaan mesin tekstil ke perusahaan peserta lelang untuk memastikan bahwa perusahaan tersebut memiliki mesin-mesin tekstil dan peralatan yang dapat mendukung pelaksanaan pengadaan bahan seragam korporat frontliner tahun 2020
7.	Sertifikasi ISO	Menyampaikan sertifikasi ISO manajemen mutu yang dimiliki oleh perusahaan dan/atau grup perusahaan (diukutkan dengan AD/ART) yang masih berlaku
8.	Pengalaman mengerjakan proyek sejenis	Berpengalaman dalam 3 (tiga) tahun terakhir pernah atau sedang mengerjakan pengadaan bahan seragam korporat (uniform) sekurangnya sebanyak 1 (satu) proyek dengan nilai minimum sebesar Rp750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) yang dibuktikan dengan copy SPK/ Surat Perjanjian yang dilegalisir serta mempunyai faktur pajak PPN pekerjaan pengadaan bahan seragam korporat (uniform).

- Lain-lain**
4.1. Dokumen yang disampaikan akan dievaluasi kelayakannya dan perusahaan yang dinyatakan lulus dalam prakualifikasi akan diundang sebagai peserta lelang melalui surat undangan.
4.2. Surat pernyataan minat mengikuti lelang ditandatangani oleh Direktur atau pihak yang berwenang mewakili perusahaan sesuai legalitas dan AD/ART perusahaan atau pihak lain dari perusahaan yang diberikan surat kuasa khusus oleh pejabat yang berwenang mewakili perusahaan sesuai kelengkapan yang berlaku. Surat kuasa khusus disertakan bersamaan dengan surat pernyataan minat. Lelang dilaksanakan oleh pemberi kuasa di atas materi Rp.6000,- dilengkapi dengan copy KTP pemberi dan penerima kuasa. Demikian atas perhatian dan partisipasinya disampaikan terimakasih

Jakarta, 24 Juli 2020
PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk.
PANTIA PENGADAAN BARANG DAN JASA
DI KANTOR PUSAT

INDOKORDSA

PT INDO KORDSA Tbk DAN ENTITAS ANAK

Office & Factory :
Jl. Pahlawan, Desa Karang Asem Timur
Citeureup, Bogor 16810
Indonesia

LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN		30 Juni 2020 dan 31 DESEMBER 2019		(Dalam Dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan khusus)	
	30 Juni 2020	31 Desember 2019		30 Juni 2020	31 Desember 2019
ASET			LIABILITAS DAN EKUITAS		
Aset Lancar			LIABILITAS		
Kas dan setara kas	23,470,827	14,238,672	Liabilitas Jangka Pendek	4,556,563	-
Kas yang dibatasi penggunaannya	55,519	55,519	Utang bank jangka pendek	-	-
Piutang usaha	15,724,389	33,258,906	Utang usaha	4,169,967	13,275,007
Piutang lain-lain	1,371,603	50,174	Pihak ketiga	4,233,848	12,245,465
Persediaan, bersih	42,574,587	45,231,190	Pihak berelasi	7,566,170	1,238,231
Pajak dibayar dimuka	2,219,412	3,696,696	Utang lain-lain	1,340,238	629,467
Utang muka dan beban dibayar dimuka lainnya	1,187,256	335,507	Beban akrual	2,437,887	3,358,982
			Utang bank jangka panjang - jatuh tempo dalam satu tahun	4,627,488	3,872,502
Total Aset Lancar	86,603,593	96,866,654	Utang muka pelanggan	66,218	64,906
Aset Tidak Lancar			Total Liabilitas Jangka Pendek	28,998,179	33,284,560
Aset tetap, bersih	151,489,615	155,062,396	Liabilitas Jangka Panjang	10,156,910	12,564,005
Utang muka pembelian aset tetap	2,811	65,370	Utang bank jangka panjang	6,023,418	6,377,671
Properti investasi	23,260,360	23,260,360	Liabilitas pajak tangguhan, bersih	6,132,562	6,042,058
Aset tidak berwujud, bersih	670,824	637,819	Liabilitas imbalan kerja	18,586	18,951
Goodwill	1,548,663	1,548,663	Utang jangka panjang lainnya	-	-
Klaim atas restitusi pajak	1,541,097	588,638	Total Liabilitas Jangka Panjang	22,331,476	25,392,685
Aset pajak tangguhan, bersih	556,817	471,805	LIABILITAS		
Investasi jangka panjang	49,456	49,456	EKUITAS		
Aset tidak lancar lainnya	688,783	733,657	Modal saham - nilai nominal Rp 500 (Rupiah penuh) per saham	130,404,630	130,404,630
Total Aset Tidak Lancar	179,808,426	182,816,164	Modal dasar: 700.000.000 lembar saham	1,676,502	1,676,502
			Modal ditempatkan dan disetor penuh: 450.000.000 lembar saham	12,134,445	11,363,885
			Tambahan modal disetor	1,040,201	1,004,697
			Selisih penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing	53,521,165	59,321,091
			Saldo laba	198,776,944	203,970,805
			Ditentukan penggunaannya	16,305,421	16,690,778
			Belum ditentukan penggunaannya	215,082,364	220,661,583
TOTAL ASET	266,412,019	279,484,828	TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	266,412,019	279,338,828

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN		30 Juni 2020 dan 30 Juni 2019		(Dalam Dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan khusus)	
	30 Juni 2020	30 Juni 2019		30 Juni 2020	30 Juni 2019
PENDAPATAN BERSIH	75,578,438	128,452,742	PENDAPATAN BERSIH	75,578,438	128,452,742
LABA POKOK PENJUALAN	(70,288,346)	(107,259,794)	LABA BRUTO	5,290,092	21,192,948
LABA BRUTO	5,290,092	21,192,948	Beban penjualan	(1,992,613)	(3,134,735)
Beban penjualan	(1,992,613)	(3,134,735)	Beban umum dan administrasi	(2,689,703)	(3,855,206)
Beban umum dan administrasi	(2,689,703)	(3,855,206)	Labas (nugi) selisih kurs	(535,114)	438,995
Labas (nugi) selisih kurs	(535,114)	438,995	Pendapatan (beban) lainnya, bersih	(40,818)	296,154
Pendapatan (beban) lainnya, bersih	(40,818)	296,154	LABA USAHA	51,844	15,208,156
LABA USAHA	51,844	15,208,156	Beban keuangan, bersih	(345,305)	(541,243)
Beban keuangan, bersih	(345,305)	(541,243)	LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN	(293,461)	14,666,913
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN	(293,461)	14,666,913	Beban (manfaat) pajak penghasilan	419,181	(4,381,421)
Beban (manfaat) pajak penghasilan	419,181	(4,381,421)	LABA	125,720	10,285,492
LABA	125,720	10,285,492	PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN		
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN			Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba-rugi	1,312,359	2,386,970
Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba-rugi	1,312,359	2,386,970	Selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan	3,228	(70,701)
Selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan	3,228	(70,701)	Keuntungan (kerugian) aktuaria atas kewajiban manfaat pensi	11,224	-
Keuntungan (kerugian) aktuaria atas kewajiban manfaat pensi	11,224	-	Lindung nilai terhadap arus kas	1,326,811	2,316,269
Lindung nilai terhadap arus kas	1,326,811	2,316,269	PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN, setelah pajak penghasilan	1,326,811	2,316,269
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN, setelah pajak penghasilan	1,326,811	2,316,269	TOTAL PENGHASILAN KOMPREHENSIF	1,452,531	12,601,761
TOTAL PENGHASILAN KOMPREHENSIF	1,452,531	12,601,761	LABA yang dapat diatribusikan kepada:		
LABA yang dapat diatribusikan kepada:			Pemilik entitas induk	411,805	9,475,330
Pemilik entitas induk	411,805	9,475,330	Keperlingan nonpengendali	(286,085)	810,162
Keperlingan nonpengendali	(286,085)	810,162	Total	125,720	10,285,492
Total	125,720	10,285,492	Total penghasilan komprehensif yang dapat diatribusikan kepada:		
Total penghasilan komprehensif yang dapat diatribusikan kepada:			Pemilik entitas induk	1,196,817	10,936,832
Pemilik entitas induk	1,196,817	10,936,832	Keperlingan nonpengendali	255,714	1,664,929
Keperlingan nonpengendali	255,714	1,664,929	LABA PER SAHAM	1,452,531	12,601,761
LABA PER SAHAM	1,452,531	12,601,761	Dasar	0,001	0,021
Dasar	0,001	0,021			

LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN		30 Juni 2020 dan 30 Juni 2019		(Dalam Dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan khusus)	
	30 Juni 2020	30 Juni 2019		30 Juni 2020	30 Juni 2019
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI :			ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI :		
Penarikan kas dari pelanggan	93,104,993	134,154,744	Penarikan kas dari pelanggan	93,104,993	134,154,744
Pembayaran kas kepada pemasok	(70,830,621)	(108,595,309)	Pembayaran kas kepada pemasok	(70,830,621)	(108,595,309)
Pembayaran kas kepada direksi dan karyawan	(8,168,110)	(11,039,416)	Pembayaran kas kepada direksi dan karyawan	(8,168,110)	(11,039,416)
Pembayaran kas untuk aktivitas operasi lainnya	(7,262,696)	(5,431,720)	Pembayaran kas untuk aktivitas operasi lainnya	(7,262,696)	(5,431,720)
Pembayaran pajak penghasilan badan	(984,592)	(3,433,430)	Pembayaran pajak penghasilan badan	(984,592)	(3,433,430)
Pembayaran biaya keuangan	(418,036)	(708,501)	Pembayaran biaya keuangan	(418,036)	(708,501)
Kas bersih diperoleh dari aktivitas operasi	5,440,938	4,946,368	Kas bersih diperoleh dari aktivitas operasi	5,440,938	4,946,368
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI :			ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI :		
Penarikan dari pendapatan bunga	76,010	99,155	Penarikan dari pendapatan bunga	76,010	99,155
Perolehan aset tetap	(564,425)	(1,983,316)	Perolehan aset tetap	(564,425)	(1,983,316)
Pembelian aset tidak berwujud	(10,165)	-	Pembelian aset tidak berwujud	(10,165)	-
Penarikan dari penjualan aset tetap	83,743	268	Penarikan dari penjualan aset tetap	83,743	268
Kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi	(414,837)	(1,883,893)	Kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi	(414,837)	(1,883,893)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN :			ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN :		
Penarikan pinjaman bank/lembaga jangka pendek dan jangka panjang	7,156,563	31,457,516	Penarikan pinjaman bank/lembaga jangka pendek dan jangka panjang	7,156,563	31,457,516
Pembayaran pinjaman bank/lembaga jangka pendek dan jangka panjang	(2,642,108)	(24,026,330)	Pembayaran pinjaman bank/lembaga jangka pendek dan jangka panjang	(2,642,108)	(24,026,330)
Pembayaran dividen	-	(9,346,441)	Pembayaran dividen	-	(9,346,441)
Pembayaran dividen oleh entitas anak kepada kepentingan nonpengendali	(641,071)	(1,279,489)	Pembayaran dividen oleh entitas anak kepada kepentingan nonpengendali	(641,071)	(1,279,489)
Kas bersih digunakan untuk aktivitas pendanaan	3,873,384	(3,194,724)	Kas bersih digunakan untuk aktivitas pendanaan	3,873,384	(3,194,724)
Kenaiikan (penurunan) bersih kas	8,899,485	(132,249)	Kenaiikan (penurunan) bersih kas	8,899,485	(132,249)
Pengaruh perubahan selisih kurs atas kas yang dimiliki	332,670	160,663	Pengaruh perubahan selisih kurs atas kas yang dimiliki	332,670	160,663
Kas dan setara kas, awal tahun	14,238,672	5,827,770	Kas dan setara kas, awal tahun	14,238,672	5,827,770
Kas dan setara kas, akhir tahun	23,470,827				